SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenaii bidang Kepegawaian telah diatur dalam keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian disempurnakan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2004;

b. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan alih jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan untuk pembagian tugas/rentang kendali dalam upaya akselerasi pelayanan yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang dan tepat anggaran perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan kembali penandatanganan keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45870);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C. 26-12/V.129-8/99 tentang Pejabat Yang Menandatangani Usul Nota Persetujuan/ Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNSD untuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas dan usul Pemberhentian dan pemberian pensiun PNSD yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

16. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung;
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Bandung;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
9. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

1. Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Wakil Bupati dan Perangkat Daerah

Pasal 3

Daftar Pejabat dan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V.

Pasal 4

Contoh specimen dan paraf pejabat yang berhak menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan semua Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian dilaksanakan secara hirarki, sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka;

1. Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Mengenai Bidang Kepegawaian (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10 Seri D);
2. Keputusan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Mengenai Bidang Kepegawaian (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inii dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 9 April 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 9 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 TAHUN 2007
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditanda tangani oleh Bupati adalah :

No	Pejabat	Kewenangan	Terhadap	Ket
1	2	3	4	5
	BUPATI	A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 BERUPA : 1. PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN; 2. PEMBEBASAN DARI JABATAN; 3. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNSD; 4. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNSD	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		B. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN;	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		C. PENCABUTAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	
		D. KEPUTUSAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL;	JABATAN SI RUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL;	
		E. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH	JABATAN ESELON II a	
		F. KEPUTUSAN FORMASI CPNSD;	FORMASI CPNSD KABUPATEN BANDUNG	
		G. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD GOLONGAN I, II, DAN III;	CPNSD KABUPATEN BANDUNG;	
		H. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD MENJADI PNSD;	CPNSD KABUPATEN BANDUNG;	
		I. KEPUTUSAN KOLEKTIF KENAIKAN PANGKAT PNSD;	CPNSD KABUPATEN BANDUNG; GOLONGAN I, II DAN III.	
		J. FORMULIR USUL NOTA PERSERJJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN BANDUNG UNTUK KENAIKAN PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOL/RUANG IV /c s/d PEMBINA UTAMA GOL RUANG IV./ e	

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 TAHUN 2007
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati adalah :

No	Pejabat	Kewenangan	Terhadap	Ket
1	2	3	4	5
	WAKIL BUPATI	A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN1980; 1. JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA : a. TEGURAN LISAN; b. TEGURAN TERTULIS; c. PERNYATAAN TIDAK PUAS; 2. JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA : a. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN b. PENURUNAN GAJI SEBESAR I KALI UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN c. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN.	a, b dan c JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN UNTUK PEJABAT S I RUKTURAL ESELON II PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG a, b, dan c JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG UNTUK PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DAN PEJABAT FUNGSIONAL;	
		B. IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP. NO 10 TAHUN1983	PNS GOLONGAN IV/ a KE ATAS	
		C. IZIN CUTI BESAR, CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		D. IZIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING	PEJABAT Si RUKTURAL ESELON II	
		E. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S-1, S-2 DAN D-3	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		F. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN DAN ATAU TANPA HAK PENSIUN	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		G. DIKLAT PIM II	CALON PESERTA	

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 TAHUN 2007
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung adalah :

No	Pejabat	Kewenangan	Terhadap	Ket
1	2	3	4	5
	SEKRETARIS DAERAH	A. IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP 10 TAHUN 1983	PNS GOLONGAN III	
		B. IJIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING	PEJABAT STRUKTURAL ESELON III	
		C. KEPUTUSAN PENETAPAN KOLEKTIF PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK	TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		D. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL	PEJABAT ESELON II	
		E. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH	JABATAN ESELON II/b	
		F. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	PNS GOLONGAN III/c KEATAS	
		G. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM S-2 DAN S-3	PND DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		H. DIKLATPIM III DAN IV	PESERTA DIKLATPIM III DAN IV	
		I. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		J. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKAKTAN CPNSD GOLONGAN III	CPNSD GOLONGAN III	
		K. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGNKAT	PNS GOLONGAN III/d KE IV/a DAN IV/a KE IV/b	
		L. SURAT PENGANTAR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN MELALUI GUBERNUR	PNS GOLONGAN IV/c S/D IV/e	
		M. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN IV/c S/D IV/e	
		N. JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA : 1. TEGURAN LISAN; 2. TEGURAN TERTULIS; 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	UNTUK PEJABAT ESELON III, IV DAN V	

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 TAHUN 2007
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditanda tangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung adalah :

No	Pejabat	Kewenangan	Terhadap	Ket
1	2	3	4	5
1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		B. IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP 10 TAHUN 1983	PNS GOLONGAN I DAN II	
		C. IJIN CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING	PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV, ESELON V, DAN PEJABAT FUNGSIONAL	
		D. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN PEGAWAI KONTRAK KERJA DAN SURAT TUGAS PEGAWAI KONTRAK KERJA	TENAGA KOONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		E. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL	PEJABAT ESELON III	
		F. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH	JABATAN ESELON III	
		G. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH	
		H. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS ANTAR UNIT KERJA	PNS NON STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		I. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM D-III DAN S-1	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		J. DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		K. IJIN PENCALONAN KEPALA DESA	CALON KADES DARI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		L. PETIKAN KEPTUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL	PNS GOLONGAN I, II	
		M. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD	CPNSD GOLONGAN I, II	
		N. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/b KE III/c DAN III/c KE III/d	
		O. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/c DAN III/d	
		P. PETIKAN KEPUTUSAN, PENINGKATAN STATUS CPNSD MENJADI PNSD	CPNSD GOLONGAN I,, II DAN III	
		Q. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN	
		R. INPASING GOLONGAN IV	PNS FOLONGAN IV	
		S. PERNYATAAN PELANTIKAN DAN	PEJABAT ESELON II, III	

		PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	SERTA PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV	
		T. SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		U. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN III, IV/a, DAN IV/b	
		V. FORMULIR NOTA USUL PERSETUJUAN BKN UNTUK MASA KERJA	PNS GOLONGAN I S/D IV	
		W. PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA	PEGAWAI TIDAK TETAP/KOONTRAK KERJA	
		X. FORMULIR USUL PENETAPAN CPNS DAERAH	CPNS GOLONGAN I DAN II	
2	KEPALA BIDANG KKESEJAHTERAAN PEGAWAI	A. REKOMENDASI/PENGESAHAN PERMOHONAN BAPERTARUM, SP 4, RIWAYAT KEPANGKATAN	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		B. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN II DAN II	
3	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI	A. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	PEJABAT ESELON IV DAN FUNGSIONAL GOLONGAN III	
		B. PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN DAN PERNYATAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	PEJABAT ESELON IV DAN FUNGSIONAL GOLONGAN III	
		C. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTA DAN SLTP	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
		D. KEPUTUSAHN PENETAPAN PLH	JABATAN ESELON IV	
4	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN KEPANGKATAN	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN II/d KE III/a DAN GOLONGAN III/a KE III/b	
		B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN	
		C. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/a DAN III/b	
		D. INPASING	PNS GOLONGAN III	
5	KEPALA SUB BIDANG MUTASI JABATAN	A. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN ESELON V DAN FUNGSIONAL GOLONGAN II	
		B. PERNYATAAN PELANTIKAN DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN ESELON V DAN FUNGSIONAL GOLONGAN II	
		C. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH	JABATAN ESELON V	
6	KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN NON FUNGSIONAL	A. FORMULIS USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I DAN II	
		B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN	
		C. INPASING	PNS GOLONGAN I DAN II	
		D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PENGKAT	PNS GOLONGAN I DAN II	
		E. LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	

7	KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN FUNGSIONAL	A. FORMULIIS USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I DAN II FUNGSIONAL	
		B. PEMBERTAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II FUNGSIONAL KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN	
		C. INPASING	PNS GOLONGAN I DAN II FUNGSIONAL	
		D. KEPUTUSAN PETIKAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I DAN II FUNGSIONAL	
		E. LEGALISIASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	
8	KEPALA SUBAG UMUM PAPDA BKD	LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	PNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 TAHUN 2007
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditanda tangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah :

No	Pejabat	Kewenangan	Terhadap	Ket
1	2	3	4	5
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	A. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN B. PEMBERIAN CUTI BERSALIN	PNS GOLONGAN IV DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG PNS DIILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG	
2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA DINAS PENDIDIKAN	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III PADA DINAS PENDIDIKAN	
3	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENDIDIKAN	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II PADA DINAS PENDIDIKAN	
4	KEPALA SATUN KERJA PERANGKAT DAERAH	A. IJIN CUTI TAHUNAN B. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERUPA TEGURAN 1. TEGURAN LISAN 2. TEGURAN TERTULIS 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	PNS PELAKSANA PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PELAKSANA PADA MASING-MASING SKPD	

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 TAHUN 2007
TENTANG : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

CONTOH SPECIMEN DAN PARAF PEJABAT YANG BERHAK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	2	3	4	5
1.	H. OBAR SOBARNA, S.Ip BUPATI BANDUNG			
2.	H. YADI SRIMULYADI WAKIL BUPATI BANDUNG			
3.	Drs. H. ABU BAKAR, M.Si 010 072 603 SEKRETARIS DAERAH KAB. BANDUNG			
4.	Ir. MULYANINGRUM SUPARDI 110 020 482 KEPALA BKD			
5.	Drs. H. ACHMAD SAEPUDIN, M.MPd 130 804 741 KEPALA DINAS PENDIDIKAN			
6.	Dra. Hj. HETTY RESTUTI, M.Si 140 076 439 KABID KESEJAHTERAAN PEGAWAI			
7.	FEBBY SURYATRISNA S, SIP 010 219 280 KABID PENGEMBANGAN PEGAWAI			
8.	TRI HERU SETIATI, SH, SP1 010 2006 328 KABID PENGADAAN DAN KEPANGKATAN			
9.	Drs. WACHYUDIN 480 113 546 KASUBID MUTASI JABATAN			
10.	Drs. DANI SYAMSAH 480 101 169 KASUBID KEPANGKATAN NON FUNGSIONAL			
11.	ELIES RUKAESIH 010 169 045 KASUBID KEPANGKATAN FUNGSIONAL			
12.	ENGKAN ISKANDAR, SH 480 099 641 KASUBAG UMUM			

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA